



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 371 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi agar dapat memberikan arahan yang jelas terkait implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lainnya Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi reformasi birokrasi di kabupaten Bantul baik general maupun tematik.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup:
1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
  2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
  3. Target-target Kinerja; dan
  4. Perangkat Daerah Koordinator dan Perangkat Daerah Pelaksana.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- KEENAM : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena :
- a. terjadi perubahan roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul;
  - b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan Reformasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Bantul; dan/atau

- c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi roadmap Reformasi Birokrasi.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Agustus 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 371 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

**I. Reformasi Birokrasi General**

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan. RB General berfokus pada 21 kegiatan utama yang menjadi mandatory, kegiatan utama tersebut antara lain:

Tabel 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tindak lanjut Permenpan 7 Tahun 2022	Rancangan Peraturan Bupati	Dokumen	-	V	V	V		Setda (Bagian Organisasi)	Identifikasi tusi sesuai dengan per UU yang berlaku	Seluruh PD
				Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka transformasi jabatan tindak lanjut Permenpan 45 Tahun 2022/Kepmenpan 1103 dan Permenpan 1 Tahun 2023	Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	V	V	V	-		Setda (Bagian Organisasi)	Identifikasi struktur organisasi tugas dan fungsi	Seluruh PD
													Pengumpulan data jabatan	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	30%	Pengumpulan data responden Internal, eksternal dan expert	Jumlah data responden	Data responden	-	V	-	-		Setda (Bagian Organisasi)	Penerapan Perbub mekanisme kerja	Seluruh PD
				Verifikasi data Responden Internal, Eksternal dan Expert	Jumlah data responden diverifikasi	Data responden	-	V	-	-		Setda (Bagian Organisasi)	Penerapan Perbub mekanisme kerja	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implemetasi Kebijakan penyusunan arsituktur SPBE	Baik	Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Bantul	Dokumen Arsitektur SPBE	Dokumen	V	V				Dinas Kominfo	Menyediakan data penyusunan arsitektur SPBE pada 6 domain: domain layanan SPBE, domain	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
													proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan domain keamanan SPBE	
				Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bantul	Dokumen Peta Rencana SPBE	Dokumen	V	V	-	-		Dinas Kominfo	Menyediakan data penyusunan potofolio inisiatif SPBE dan Roadmap SPBE	Seluruh PD
				Penyusunan Kebijakan Internal SPBE	Dokumen Kebijakan Internal SPBE	Dokumen	V	V	-	-		Dinas Kominfo	Memanfaatkan Kebijakan Internal SPBE sebagai pedoman penyelenggaraan layanan E-Government	Seluruh PD
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE	Laporan Pemantaun dan Evaluasi SPBE	Dokumen	-	-	V	V		Dinas Kominfo	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Kabupaten Bantul	81,2	Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Bimtek pendampingan, desk dan Laporan	Kegiatan	V	V	V	V		Bappeda	Menyusun/me reviu Renstra, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola perencanaan	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
													dan penganggaran yang baik	
													Menyusun Logical Framework Perencanaan, Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan	Seluruh PD
													Monitoring dan evaluasi kinerja berkala	Seluruh PD
													Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Seluruh PD
													Pengukuran dan pelaporan kinerja berkala didukung data yang berkualitas	Seluruh PD
				Pendampingan SAKIP OPD	Pendampingan Penguatan SAKIP	Bimtek dan sosialisasi	V	-	-	V		Setda (Bag. Organisasi)	Menyusun dan menginternalisasikan Perjanjian Kinerja	Seluruh PD
													Menyusun dan melaporkan LKJIP	Seluruh PD
				Evaluasi SAKIP OPD	Laporan Hasil Evaluasi	Dokumen	V	V	-	-		Inspektorat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Seluruh PD



No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
		Indek Prencanaan Pembangunan	Meningkat	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Dokumen Evaluasi pelaksanaan RKPD	Dokumen	-	V		V		Bappeda	Penyusunan Dokumen evaluasi Pelaksanaan Renja PD	Seluruh PD
				Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati	Dokumen	-	V	V	-		Bappeda	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Seluruh PD
				Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	Dokumen	-	-	V	V		BPKPAD	Penyusunan Plafon Anggaran dan RKA	Seluruh PD
				Penyusunan APBD dan Penyusunan APBD Perubahan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Dokumen	-	-	V	V		BPKPAD	Penyusunan DPA	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Transformasi pelayanan publik digital	84%	Pengelolaan Pusat Data	Laporan Pengelolaan Pusat Data	Dokumen	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Mengelola pusat data pemerintah daerah	Seluruh PD
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi	Unit	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Mengembangkan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik	Seluruh PD
				Menghubungkan Layanan Publik ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Application Programming Interface (API)	Layanan	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Mengintegrasikan layanan publik ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Seluruh PD
				Implementasi Program Inovasi yang sesuai dengan Masterplan	Dokumen Implementasi Program	Dokumen	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Mengimplementasikan program	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
				Smart City	Inovasi								inovasio yang sesuai dengan Masterplan Smartsity	
				Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan	Dokumen	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Seluruh PD
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di perangkat daerah	Tingkat Keberhasilan unit kerja mendapat predikat Zona Integritas	3 OPD	Pelaksanaan survey PAK dan Persepsi Kualitas Pelayanan pada Perangkat Daerah yang dijukan Penilaian ZI WBK/WBBM	Nilai Survey PAK dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Unit	-	V	-	-		Inspketorat	Mengikuti survey	PD sample
				Pelaksanaan pendampingan penilaian mandiri zona integritas pada perangkat daerah yang akan diajukan ZI WBK/WBBM	Jumlah perangkat daerah dilakukan pendampingan zona integritas	Unit	-	-	V	-		Inspketorat	menyiapkan bukti dukung progres pelaksanaan ZI	PD sample
				Pelaksanaan evaluasi dalam pengisian KKE dan bukti pendukungnya pada perangkat daerah yang diajukan ZI	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi ZI	Unit	-	-	V	-		Inspketorat	Menindalanjuti hasil evaluasi	PD sample

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
				WBK/WBBM										
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,1	Melakukan pendampingan persiapan penilaian mandiri SPIP tingkat Pemda	form exell import sasaran ,indikator kinerja dan target kinerja daerah	formulir	-	-	V	-		Inspektorat	Membuat form sasaran daerah,indikat or kinerja dan target kinerja daerah	Inspektorat, Bappeda,BP KPAD
				Melakukan pendampingan persiapan penilaian mandiri SPIP seluruh Satker	form exell import sasaran , indikator kinerja dan target OPD	formulir	-	-	V	-		Inspektorat	Membuat form sasaran daerah,indikat or kinerja dan target kinerja satker	Seluruh OPD
				Melaksanakan pendampingan Penilaian Mandiri Pemda	keterisian data penilaian pencapaian tujuan SPIP level Pemda	dokumen	-	-	V	-		Inspektorat	Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan SPIP level Pemda	Bappeda
					keterisian data penilaian penetapan tujuan SPIP level Pemda	dokumen	-	-	V	-		Inspektorat	Melakukan penilaian atas penetapan tujuan SPIP level Pemda	Bappeda, Inspektorat,, BPKPAD
					keterisian data penilaian struktur proses level Pemda	dokumen	-	-	V	-		Inspektorat	Melakukan penilaian atas struktur proses level Pemda	Inspektorat, BPKPAD
				Melakukan pendampingan penilaian Mandiri Satker	keterisian data penilaian pencapaian tujuan SPIP level satker	dokumen	-	-	V	-		Inspektorat	Melakukan penilaian mandiri atas pencapaian tujuanSPIP level satker	Seluruh OPD
					keterisian data penilaian penetapan tujuan SPIP level satker	dokumen	-	-	V	-		Inspektorat	Melakukan penilaian mandiri atas penetapan tujuan SPIP	Seluruh OPD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
					keterisian data penilaian struktur proses level satker	dokumen	-	-	V	-		Inspektorat	Melakukan penilaian mandiri atas struktur proses SPIP level satker	Seluruh OPD
				Melaksanakan penjaminan kualitas atas Penilaian mandiri Level Pemda	Laporan hasil penjaminan kualitas penyelenggaraa n SPIP level Pemda	laporan	-	-	V	-		Inspektorat	-	Inpektorat
				Melaksanakan penjaminan kualitas atas Penilaian mandiri Level Satker	Laporan hasil penjaminan kualitas penyelenggaraa n SPIP level Satker	laporan	-	-	V	-		Inspektorat	-	Inspektorat
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindaklanjut Pengaduan	100%	Monitoring pelaksaaan layanan pengaduan	Laporan Monitoring layanan pengaduan	Dokumen	-	V	-	V		Dinas Kominfo	Penyusunan data aduan	Seluruh PD
				Pembinaan pengelola pengaduan (Pejabat Penghubung OPD)	Forum Pengelolaan Pangaduan	Kegiatan		V		V		Dinas Kominfo	Menindaklanju ti Aduan	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Survei Penilaian Integritas	80	Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Survey Penilaian Integritas pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul	Jumlah perangkat daerah yang ikut sosialisasi dan Kampanye SPI KPK 2023	Jumlah	V	V	V			Inspketorat	Mengikuti survey	Seluruh PD
				Penyusunan rencana aksi dan Tindak lanjut SPI Tahun 2022	Jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti	Jumlah	V	V	V	V		Inspketorat		Inspketorat
				Pengumpulan data responden Internal, eksternal dan expert	Jumlah data responden	Data Responden	-	V	-	-		Inspketorat	Mengirimkan data pegawai	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan (IKK)	40	Verifikasi data Responden Internal, Eksternal dan Expert	Jumlah data responden	Data Responden	-	V	-	-		Inspkedorat	-	Inspkedorat
				Penyusunan SOP IKK	SK Setda tentang SOP IKK	Dokumen	-	-	V	-		Setda (Bagian Hukum)	-	Setda (Bagian Hukum)
				Penyampaian populasi kebijakan	Jumlah Prpduk hukum	Dokumen	-	-	V	-		Setda (Bagian Hukum)	Melakukan Entri IKK dalam portal IKK	Seluruh PD
				pengukuran Hasil IKK	Indesk IKK	Indeks	-	-	-	V		Setda (Bagian Hukum)	-	Setda (Bagian Hukum)
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	60	Penyusunan SK Tim kerja, tim asesor dan tim penilai	SK Bupati Tentang Pokja IRH	Dokumen	V	-	-	-		Setda (Bagian Hukum)	-	Setda (Bagian Hukum)
				Pembinaan IRH	Laporan IRH	Dokumen	-	V	V	-		Setda (Bagian Hukum)	-	Setda (Bagian Hukum)
				Penilaian IRH	Indesk IRH	Indeks	-	-	-	V		Setda (Bagian Hukum)	-	Setda (Bagian Hukum)
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Indek Pegelolaan Arsip Digital	80	Melaksanakan upload arsip digital kedalam aplikasi SIKN/JIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	Jumlah arsip digital yang diunggah	Arsip	77	77	78	79	310	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mengidentifikasi dan menyerahkan Arsip Statis ke Dinas perpusip selaku LKD	Seluruh PD
				Memberikan layanan dan akses informasi arsip kepada masyarakat dan instansi yang membutuhkan	Jumlah pengunjung yang mengakses informasi arsip	Pengunjung	20	20	20	20	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3,5	Pelaksanaan perencanaan data meliputi identifikasi	Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	Dokumen	V	-	-	-		Dinas Kominfo	Forum Satu Data Indonesia	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
				kebutuhan data dan penetapan daftar data										
				Pelaksanaan ketugasan walidata meliputi pemeriksaan dan penyebarluasan data statistik sektoral	Laporan Penyelenggara n Satu Data Indonesia	Dokumen	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Mengumpulka n data statistik sektoral melalui portal Data Bantul	Seluruh PD
				Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah rekomendasi kegiatan statistik dari BPS	Rekomen dasi	-	-	V	-		Dinas Kominfo	Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral ke BPS	Seluruh PD
				Penyusunan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	Metadata	-	-		V		Dinas Kominfo	Menyusun metadata kegiatan statistik sektoral	Seluruh PD
				Pemeliharaan dan pengembangan Portal Data Bantul	Jumlah portal data terpelihara	Aplikasi	V	V	V	V		Dinas Kominfo	Monitoring fungsionalitas Portal Data Bantul	Seluruh PD
				Pemanfaatan Big Data dari Marketplace	Penyajian hasil analisa big data	Dashboa rd	-	-	V	V		Dinas Kominfo	Memanfaatka n hasil analisa big data	Seluruh PD khususnya pengampu kebijakan, DKUKMP, dan Bappeda
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indek tata kelola pengadaan barang dan jasa	63	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada OPD	Laporan pendampingan	Dokumen	-	-	V	-		Setda (Bagian PBJ)	Penyusunan Rencana umum pengadaan	Seluruh PD
				Verifikasi realisasi pengadaan barang dan jasa	Dokumen verifikasi	Dokume n	-	-	-	V		Setda (Bagian PBJ)	-	Setda (Bagian PBJ)
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kualitas Pengelolaan Anggaran	Baik	Verifikasi RKA dan DPA SKPD melalui sistem	Dokumen RKA dan DPA terverifikasi	dokumen	V	V	V	V		BPKPAD	Menindaklanju ti hasil verifikasi	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
		Pengelolaan Asetnya	Baik	Rekonsiliasi aset	Update data aset	Laporan aset	V	V	V	V		BKPAD	Menyusun laporan aset	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transpormasi Jabatan fungsional	Baik	Pelaksanaan pengangkatan ASN kedalam Jabatan Fungsional sesuai dengan formasi kebutuhan masing-masing Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan ASN kedalam Jabatan Fungsional	Persen	218	51	70 2	55	1.026	BKPSDM	Proses pengangkatan jabatan fungsional	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Baik	Pelaksanaan tes potensi dan kompetensi PNS dengan sistem online menggunakan Aplikasi Sobat Karir	Jumlah Pengukuran Potensi dan Kompetensi ASN	ASN	-	251	1.0 26	838	2.115	BKPSDM	Penjaringan peserta pengukuran potensi dan kompetensi	Seluruh PD
				Perekapan hasil dari tes potensi dan kompetensi PNS	Rakap hasil dari tes potensi dan kompetensi ASN	Laporan	V	V	V	V	12	BKPSDM	Penyusunan laporan pengukuran potensi dan kompetensi	Seluruh PD
				Penyusunan/ Pengelompokan PNS dalam talenta	Jumlah PNS yang masuk dalam kolam talenta	PNS	V	V	V	V		BKPSDM	Pengelompok an hasil pengukuran potensi dan kompetensi	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implemetasi Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN	Baik	Optimalisasi pembelajaran diklat melalui Learning Manajemen System (LMS) Kab. Bantul	Peserta diklat menggunakan LMS kab. Bantul	ASN	-	V	-	-		BKPSDM	Menyusun data	BKPSDM
		Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	100%	Fasilitasi pelaksanaan rekrutment ASN sesuai ketentuan yang berlaku	Rekrutmen ASN sesuai dengan aturan	Jenis seleksi	-	-	V	V		BKPSDM	Penyusunan analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
		Tingkat implementasi Platform digital ekosistem	Baik	Pemutakhiran data kepegawaian sebagai basis data utama kepegawaian	Persentase Data pegawai termutakhir	Persen	V	V	V	V		BKPSDM	Pemutakhiran Data	BKPSDM
		Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	90%	Melaksanakan sosialisasi penyusunan e-kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi	Perangkat Daerah	V	-	-	-		BKPSDM	Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan kinerja	Seluruh PD
				Pendampingan dan coaching clinic pengelolaan kinerja	Persentase jumlah ASN dalam penyusunan pengelolaan kinerja	Persen	V	V	V	V		BKPSDM	Pelaksanaan Pendampingan pengelolaan kinerja	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks merit sistem	250 Indeks	Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai konsep penyederhanaan birokrasi	Persentase keterisian pegawai sesuai formasi	Indeks	-	-	V	-		BKPSDM	-	BKPSDM
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Tingkat implementasi budaya kerja	Baik	Identifikasi Rencana reviu Peraturan Bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN	Draft Peraturan Bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN	Dokumen	-	-	V	V		BKPSDM	Koordinasi penyusunan draft Peraturan Bupati	Seluruh PD
				1. Menetapkan Agen Perubahan PD	SK Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan	Dokumen	V	-	-	-		Setda (Bagian Organisasi)	Mengusulkan agen perubahan	Seluruh PD
				2. Pendampingan Agen Perubahan OPD	Sosisalisasi tugas fungsi agen perubahan	Kegiatan	-	-	-	V		Setda (Bagian Organisasi)	Membentuk kelompok kerja budaya kerja	Seluruh PD
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya pemerintahan OPD	Monev Budaya Kerja OPD	Dokumen	V	V	V	V		Setda (Bagian Organisasi)	Menyusun Rencana aksi Budaya kerja	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indek Kualitas Pelayanan Publik	4,6	Pendampingan penyusunan dokumen evaluasi pelayanan Publik	Evaluasi pelayanan Publik PD	Dokumen	V	V	-	-		Setda (Bagian Organisasi)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Seluruh PD



No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	Total		Ren.aksi Pelaksana	PD Pelaksana
				Pendampingan pelaksanaan evaluasi Pelayanan Publik	Evaluasi pelayanan publik	Dokumen	V	V	-	-		Setda (Bagian Organisasi)	Menyiapkan bukti dukung evaluasi pelayanan publik	Seluruh PD
		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	90	Pendampingan penyusunan dokumen Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Dokumen kepatuhan Pelayanan Publik	Dokumen	-	V	V	-		Setda (Bagian Organisasi)	Penyusunan dokumen Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Seluruh PD

## **II. Reformasi Birokrasi Tematik**

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. 5 tema Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Adapun Digitalisasi administrasi pemerintahan akan di fokuskan dalam percepatan capaian penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Adapun Prioritas dan aktual presiden diarahkan untuk :

- a. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
- b. Pengendalian Inflasi

Tabel 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Tota I			
Rendahnya kualitas dan keterpaduan database	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Satu data terpadu By Name By Address By NIK	85%	Rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data sasaran	%	Data penduduk miskin yang telah dimutakhirkan	-	-	30	40	70	Tidak Terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melakukan profiling data kemiskinan ekstrem	%	penduduk miskin ekstrem yang di-profiling	-	-	50	50	100	Tidak Terkait	Bappeda	Dinas Sosial, PD terkait dan Mitra
Perencanaan dan penganggaran pengantasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sektor dan instansi	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien	Keselarasan perencanaan penganggaran	80%	Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026	dokumen	Dokumen RPKD	-	-	1	-	1	Tidak Terkait	Bappeda	Bappeda dan PD
				Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024	dokumen	Rencana Aksi Tahunan	-	-	-	1	1	Tidak Terkait	Bappeda	Bappeda dan PD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Tota I			
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan/bimtek/diklat/dll	70%	Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM aparatur pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pada setiap Perangkat Daerah terkait	%	SDM pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang telah ditingkatkan kapasitasnya	-	-	35	35	70	Tidak Terkait	Bappeda	Perangkat Daerah pengampu program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat
				Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM pelaksana/pendamping program bantuan sosial	%	SDM pelaksana/pendamping program bantuan sosial yang telah ditingkatkan kapasitasnya	-	-	100	-	100	terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Meningkatkan kapasitas dan integritas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah ditingkatkan kapasitasnya	-	-	40	-	40	Tidak Terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Pelaksanaan program dan kegiatan masih banyak	Terlaksananya pengentasan kemiskinan yang sesuai	Persentase aduan masyarakat yang terlayani	100%	Melaksanakan pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kalurahan	%	Pelayanan Puskesmas di Kalurahan	100	100	100	100	100	terkait	Dinas Sosial	Kalurahan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Tota I			
dikeluhkan masyarakat	dengan kebutuhan			Melaksanakan Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	bulan	Pelayanan SLRT di Kabupaten	3	3	3	3	12	terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Pengurangan beban pengeluaran warga miskin	Jumlah program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang diberikan	8 Program	Melaksanakan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Boga Sehat)	bulan	Pelaksanaan Program Bantuan Sosial	3	3	3	3	12	terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan	bulan	Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan	3	3	3	3	12	terkait	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Mitra
				Melaksanakan Program bantuan perumahan, sanitasi dan air minum	kegiatan	Pelaksanaan program bantuan perumahan, sanitasi dan air minum	V	V	V	V		terkait	Dinas PUPKP	Dinas PUPKP dan Mitra
				Melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah	%	Persentase Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal yang mendapatkan Program Bosda	100	100	100	100	100	terkait	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Satuan Pendidikan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Tota I			
Masih rendahnya kemampuan dan akses berusaha warga miskin	Penanggulang an kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan usaha	6 kegiatan	Melaksanakan program WRSE, KUBE, PKH Graduasi	kegiatan	pelaksanaan program WRSE, KUBE, PKH Graduasi	V	V	V	V		terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melaksanakan kegiatan pengembangan, pengolahan dan pemasaran perikanan	kegiatan	Jumlah kegiatan pengembangan sektor perikanan	V	V	V	V		Tidak Terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Mitra
				Melaksanakan kegiatan pengembangan, pengolahan dan pemasaran pertanian dan peternakan	kegiatan	Jumlah kegiatan pengembangan sektor pertanian dan peternakan	V	V	V	V		Tidak Terkait	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Mitra
				Melaksanakan kegiatan pengembangan, pengolahan dan pemasaran pariwisata	kegiatan	Jumlah kegiatan pengembangan sektor pariwisata	V	V	V	V		Tidak Terkait	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Mitra
				Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan produktif	kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan produktif	V	V	V	V		terkait	Dinas Tenaga kerja dan Transmigra si	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Mitra
				Fasilitasi UMKM	kegiatan	Jumlah kegiatan fasilitasi UMKM	-	V	V	V		terkait	Dinas KUKMPP	Dinas KUKMPP dan Mitra

Tabel 3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
Belum jelas regulasi terkait investasi	Meningkatkan Kepastian aturan berinvestasi	Jumlah Regulasi investasi	1 dokumen SK Bupati, 1 dokumen NA Perda PM	Penyusunan regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif	Tersedianya SK Bupati tentang Tim Verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul	dokumen	V	-	-	-		Tidak terkait	DPMPTSP	DPUPKP, Dinpar,Dinkes, Bagian Hukum, Bagian Tapem, BAPPEDA, DLH, BPKPAD, Disnakertrans, DPTR, Satpol PP
					Tersedianya Naskah Akademik perda penanaman modal	dokumen	-	V	-	-		Tidak terkait	DPMPTSP	DPMPTSP
				kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Tersusunnya RDTR	Dokumen	-	-	-	V		Tidak terkait	DPTR	DPTR
					Penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri (KPI)	Dokumen	-	-	-	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan						Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total				
Unit pelayanan yang belum ter integrasi	Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan berinvestasi	Jumlah layanan dalam MPP	14 tenant/gerai layanan	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik/MPP	Tersedianya perbup penyelenggaraan MPP	dokumen	-	-	V	-		Tidak terkait	DPMPTSP	Bagian Hukum, Bagian Tapem	
					Tersedianya dokumen PKS penyelenggaraan MPP	dokumen	-	-	V	-		Tidak terkait	DPMPTSP	Kejari, PT. Pos Indonesia,KPP D/Samsat,PT. Taspen,KPP Pratama,Pengadilan Agama,BPJS Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan,Kantor Samsat, BNN, BPPOM,Kemendagri	



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan						Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total				
		Jumlah pelaku usaha mendapatkan pendampingan pelayanan perijinan	440	Pendampingan Pemberian Fasilitas Kemudahan Berusaha melalui inovasi GAMPIL ( Gerakan Pendampingan Melayani Perizinan Langsung )	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku usaha	V	V	V	V		Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Bank BPD, Disperindagkop	
				Pendampingan Pelaporan relisasi investasi melalui inovasi GEPLAK ( Gerakan Pendampingan LKPM )	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pendampingan Pelaporan relisasi investasi melalui inovasi GEPLAK ( Gerakan Pendampingan LKPM )	Pelaku usaha	V	V	V	V		Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP	
Kurangnya daya tarik investor untuk berinvestarsi	Meningkatkan daya tarik investasi dikabupaten Bantul	Prosentase Pertumbuhan Invesrsi	11,29%	fasilitasi bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal dan/atau peralatan kerja	Pelaku usaha			V	V		Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP, BPKPAD	
				Updating data SIDAKUI	Data SIDAKUI terupdate	Data UMKM	V	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP, Diskominfo	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
				Kajian potensi penanaman modal	tersediaannya data dan informasi peluang Penanaman Modal	Dokumen	-		V			Tidak terkait	DPMPTSP	DPMPTSP
				penyediaan sarana dan prasarana;	Pembangunan/peningkatan jalan yang mendukung investasi	ruas jalan	-	V	V	V		Tidak terkait	DPUPKP	DPUPKP, Dishub
					Pembuatan jaringan air bersih dan limbah	Jaringan	-	V	V	V		Tidak terkait	DPUPKP	DPUPKP, DLH
					Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah	Unit	-	V	V	V		Tidak terkait	DLH	DLH
					Menyediakan portal layanan perizinan yang terintegrasi	aplikasi	V	V	V	V		Tidak terkait	Diskominfo	Diskominfo, DKUKMPP
				fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Rekomendasi pemanfaatan tata ruang	dokumen	V	V	V	V		Tidak terkait	DPTR	DPTR
				kemudahan akses pemasaran hasil produksi;	Keikutsertaan dalam pameran dan promosi	Kali	V	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
					Menyediakan aplikasi jual beli produk UMKM/ IKM	Aplikasi	V	V	V	V		Tidak terkait	DISKOMINFO	DISKOMINFO, DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan						Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total				
				kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Sertifikat	V	V	V	V		Tidak terkait	BAPPEDA	BAPPEDA	
					Fasilitasi Sertifikat halal	Sertifikat	V	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP	
Kurangnya tenaga kerja terampil yang dibutuhkan pelaku usaha	Meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil	Jumlah tenaga kerja terlatih/bersertifikat	368 Orang	kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	Penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha;	Dokumen	V	V	V	V		Tidak terkait	DISNAKERTANS	DISNAKERTANS	
					Pelatihan kerja bagi pencari kerja	Pencari kerja	V	V	V	V		Tidak terkait	DISNAKERTANS, DPUPKP, DKUKMPP	DISNAKERTANS, DPUPKP, DKUKMPP	

Tabel 4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang di fokuskan dalam percepatan capaian penanganan stunting.

Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
				Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
Meningkatkan kunjungan balita ke posyandu balita untuk melakukan penimbangan dan pengukuran	Persentase balita di timbang dan diukur	82,01%	Pemantauan tumbuh kembang balita dengan berkolaborasi dengan kader kesehatan posyandu balita diwilayah	Balita ditimbang dan diukur di posyandu	Orang	V	v	v	v		Terkait	Dinkes	Dinkes, Kader Kesehatan Desa
			Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kebalita mal nutrisi	kebalita mal nutrisi mendapatkan makanan tambahan	balita	-	-	V	-		Terkait	Dinkes	Dinkes, Kader Kesehatan Desa, Tim pendamping keluarga (TPK)
Stakeholder terinformasi data stunting	Persentase updeting data balita stunting	100,00%	Menyampaikan informasi terkait dengan data balita stunting perkalurahan setiap penimbangan perbulan untuk monitor dan evaluasi masing-masing stakeholder melalui aplikasi bantuL pedia	Data balita stunting per kalurahan	Orang	V	V	V	V		tidak terkait	Dinkes	Dinkes, Kader Kesehatan Desa

Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
				Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
Meningkatkan capaian ibu hamil mendapatkan Tablet tambah darah	Prosentase ibu hamil mendapatkan Tablet tambah darah	89,64%	Pendampingan pada ibu hamil agar melakukan Antenatal care di faskes pada trimester 1 dan pendampingan konsumsi TTD	Tersedianya data ibu hamil mendapatkan TTD	Dokumen	V	V	V	V		Tidak terkait	Dinkes	Dinkes, DP3AP2KB, Kader Kesehatan Desa, Tim pendamping keluarga (TPK)
meningkatnya data cakupan catin yg mendownload aplikasi ELSIMIL	Persentase kelengkapan dan kulaitas data pengantin	100%	Menghimbau dan mengingatkan catin untuk mendownload dan mengisi formulir di ELSIMIL agar kondisi kesehatan catin dan kesiapan dalam kehamilan dapat terpantau dengan baik.	Jumlah Catin yang mendownload dan mengisi formulir di ELSIMIL	Orang	V	V	V	V		Tidak terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, Kemenag, Dinkes, Disdukcapil, Tim Pendamping Keluarga (TPK)
			Sinkronisasi data catin dengan Kemenag, Dinkes dan Dispendukcapil	Updating data Calon pengantin	Data catin	V	V	V	V		Tidak terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, Dinkes, Disdukcapil
Optimalisasi pendampingan Keluarga berisiko stunting	Prosentase Keluarga berisiko stunting terdampingi	100%	Optimalisasi peran tim percepatan penurunan stunting dan monitoring pendampingan TPK di wilayah Kapanewon maupun Kalurahan	Keluarga berisiko stunting mendapatkan Pendampingan	keluarga	V	V	V	V		Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPK, Dinkes

Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
				Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
Menurunnya angka kehamilan tidak diinginkan	Prosentase sosialisas mengenai 4 Terlalu di seluruh Kapanewon	100 %	Memberikan edukasi edukasi mengenai upaya pencegahan 4Terlalu	Sosialisasi edukasi upaya pencegahan 4Terlalu	pelaksanaan sosialisasi	V	V	V	V		tidak terkait	DP3APPKB,	DP3APPKB, Dinkes, PKK
Optimalisasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) / Dapur Gizi Keluarga Berbasis Bahan Pangan Lokal	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) yg memiliki Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	75%	Pembentukan dan optimalisasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) / Dapur Gizi Keluarga Berbasis Bahan Pangan Lokal	kalurahan yang memiliki Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Kampung KB	V	V	V	V		Tidak Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPPS, Tim Pendamping Keluarga (TPK)
Meningkatnya pemberian makanan tambahan kepada sasaran stunting	Prosentase sasaran stunting yang mendapatkan bantuan pemberian makanan tambahan	100%	melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dalam pemebrian makanana tambahan agar dapat sesuai dengan standar intervensi spesifik	Keluarga berisiko stunting mendapatkan PMT yang sesuai	Orang	V	V	V	V		Terkait	DPMKAL	DPMKAL, Dinkes, Dinsos, DP3APPKB

Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
				Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
Optimalisasi peran bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dalam mendukung penanggulangan stunting	Prosentase Bapak Asuh anak Stunting(BAAS) yang menjalankan perannya	75%	Dilaksanakan sosialisasi dan penguatan lebih lanjut mengenai program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di seluruh level TPPS	Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) terlibat langsung dalam penanganan stunting	BAAS	V	V	V	V		Tidak terkait	BAPPEDA, DP3APPKB	Semua OPD Terkait Penanganan Stunting
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks SPBE	3,3	Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Bantul	Dokumen Arsitektur SPBE	Dokumen	V	V	-	-		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Peta Rencana SPBE	Dokumen	V	V	-	-		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Penyusunan Kebijakan Internal SPBE	Jumlah Kebijakan Internal SPBE	Dokumen	V	V	-	-		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Dokumen Keputusan Bupati	Dokumen	V	V	-	-		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur Manajemen SPBE	Dokumen SOP	Dokumen	V	V	-	-		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah	Titik	V	V	V	V		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi yang terhubung pada SPLP	Aplikasi	V	V	V	V		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Digitalisasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerinbtahan	Jumlah layanan yang telah dilaksanakan secara digital	Layanan	V	V	V	V		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD

Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
				Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE	Laporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Dokumen	-	-	V	V		Tidak terkait	Dinas Kominfo	Seluruh PD



Tabel 5. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Total			
SDM Tata Kelola yang Belum Kompeten	Meningkatnya Pengelola PBJ yang Kompeten	Jumlah SDM Pengelola PBJ yang Tersertifikasi	Meningkat	Melakukan Pelatihan kepada SDM UKPBJ	SDM UKPBJ yang Dilatih	Orang	-	V	V			Tidak terkait	BKPSDM	BKPSDM
				Melakukan Sertifikasi kepada SDM UKPBJ yang Sudah Diberikan Pelatihan	Jumlah SDM UKPBJ yang Lulus Sertifikasi	Orang	-	-	-	V		Tidak terkait	BKPSDM	BKPSDM
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	level kematangan proaktif	Melakukan peningkatan pada Domain Proses	Peningkatan Domain Proses	Kegiatan	-	V	V	-		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh PD
				Melakukan peningkatan pada Domain Kelembagaan	Peningkatan Domain Kelembagaan	Kegiatan	-	V	V	-		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh PD
				Melakukan peningkatan pada Domain SDM	Peningkatan Domain SDM	Kegiatan	-	-	V	V		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan BKD
				Melakukan peningkatan pada Domain Sistem Informasi	Peningkatan Domain SI	Kegiatan	-	-	V	V		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ
Sistem Teknologi yang Belum Optimal dalam Menunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Melalui Sistem	Indikator pemanfaatan sistem pengadaan Skor 25	Melakukan peningkatan pada SIRUP	Peningkatan pemanfaatan SIRUP	Kegiatan	-	V	-	-		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada e-Tendering	Peningkatan pemanfaatan e-Tendering	Kegiatan	V	V	V	V		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada e-Purchasing	Peningkatan pemanfaatan e-Purchasing	Kegiatan	V	V	V	V		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada Non e-Tendering dan Non e-Purchasing	Peningkatan pada pemanfaatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing	Kegiatan	V	V	V	V		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Total			
				Melakukan peningkatan pada e-Kontrak	Peningkatan pada e-Kontrak	Kegiatan	V	V	V	V		Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
Proses sertifikasi TKDN yang sulit	Meningkatnya kualitas produk dalam negeri	Sertifikasi TKDN bagi UMKM sesuai SLA xx hari	25 UMKM	Proses sertifikasi TKDN bagi UMKM lokal sesuai SLA xx hari	Jumlah UMKM tersertifikasi TKDN	Kegiatan	V	V	V	V		Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
Regulasi daerah yang tidak mendukung	Meningkatnya kepastian hukum P3DN	Jumlah regulasi yang mendukung P3DN	2 macam	Penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Jumlah regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Kegiatan	-	V	-	-		Tidak Terkait	DKUKMPP dan UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait e-tendering, e-purchasing dll	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait e-tendering, e-purchasing, dll	Jumlah pelaku usaha dan UMKM yang paham dengan proses e-tendering, P3DN dst	100 pelaku usaha	Melakukan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan UMKM lokal	Jumlah sosialisasi terhadap pelaku usaha	Kegiatan	-	V	V	-		Terkait	DKUKMPP dan UKPBJ	DKUKMPP dan UKPBJ
		Peningkatan Jumlah MoU yang dibuat dengan pelaku usaha PDN	400 UMKM	Melakukan MOU dengan UMKM dan pelaku usaha PDN	Pelaksanaan MOU dengan pelaku usaha dan UMKM	Kegiatan	-	-	V	V		Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP/T APEM
Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia	Tersedianya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	% barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	50%	Melakukan <i>business matching</i> antara UKPBJ, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Peta kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa tersusun tepat waktu	Laporan RUP	-	V	-	-		Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
Kualitas barang/jasa yang masuk dalam e-katalog belum memenuhi standar yang				Membuat MoU dengan Perusahaan Swata/BUMN untuk memberikan program pelatihan keahlian kepada pelaku usaha UMKM	jumlah kegiatan pelatihan keahlian dari Perusahaan Swasta/BUMN terselenggara	Dokumen	-	-	V	V		Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Leading Sector	Pelaksana
					Satuan	Indikator	I	II	III	IV	Total			
dibutuhkan PD														
Harga yang tercantum belum merupakan harga final				Melakukan monev e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)	laporan monev berkala ketersediaan jumlah, kesesuaian kualitas barang/jasa, dan kepastian harga dalam e katalog tersusun tepat waktu	laporan	-	-	V	V		Tidak Terkait	UKPBJ	UKPBJ

Tabel 6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
Kurang terkoordinasikannya pelaksanaan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya peran TPID	Tersusunnya perbub Roadmap PID	1 dok	Membentuk TPID	SK Bupati Tim TPID	Dokumen	V	-	-	-		Tidak terkait	Bagian PPSDA	Bagian PPSDA
				Mengkoordinasikan tim pengendali inflasi Daerah	Koordinasi Tim TPID	rapat koordinasi	V	V	V	V		Tidak terkait	Bagian PPSDA	Bagian PPSDA
				Evaluasi pelaksanaan TPID	informasi harga bahan pokok di web Bantulkan.go.id	Informasi harga	V	V	V	V		Tidak terkait	Bagian PPSDA	Bagian PPSDA
Adanya ketimpangan stok bahan pokok antar daerah	Terjalannya kerjasama antar daerah dalam pemerataan bahan pokok	stabilitas harga bapak	sesuai HET	Kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi	Tersusunnya MOU	Dokumen MOU	-	-	V	-		Terkait	Bagian PPSDA	TPID
Masih panjangnya rantai distribusi	Mewujudkan proses distribusi yang efektif dan efisien	Stabilitas harga sembako	Harga acuan/HET	pendampingan penyediaan dan pendistribusian komoditas beras dan komoditas lainnya diutamakan pada Kapanewon kantong kemiskinan	Laporan kegiatan	kali	-	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Pemantauan harga Bapak di distributor, pasar rakyat dan toko modern	Jumlah laporan hasil pemantauan	kali	-	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				fasilitasi Pos pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok	jumlah Posko HKBN	Posko	-	-		V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
				melaksanakan pengawasan ketersediaan dan harga di distributor/pelaku usaha bahan pokok	Laporan hasil pengawasan	Dokumen laporan	V	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Optimalisasi pengelolaan Gudang SRG	Monev Pengelolaan Gudang SRG	Dokumen Laporan	V	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Meningkatkan pelayanan penjualan langsung komoditi pangan melalui Bazar Murah Bapak	Operasi pasar	Laporan Kegiatan	-	-		v		Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media cetak dan elektronik	Penyampaian updating data harga bapak	data	V	V	V	V		Tidak terkait	DKUKMPP	DKUKMPP, Dinas Kominfo
masih adanya jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik/rusak	Peningkatan kualitas jaringan irigsi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten bantul yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,73%	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	-	-	v	v		Tidak terkait	DPUPKP	DPUPKP
Ruas jalan di kabupaten bantul masih belum dalam konsisi mantap	Peningkatan kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi mantab	Tingkat kemantapan jalan	78,84	Rehabilitasi jalan kabupaten	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	-	-	v	v		Tidak terkait	DPUPKP	DPUPKP
Kekurangan pasokan komoditas ikan	Terpenuhinya kebutuhan ikan dipasaran	Jumlah produksi perikanan	5 Ton/hari	Kegiatan Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan	Laporan hasil kegiatan	Kali	v	v		-		Tidak terkait	DKP	DKP
				Memberi bantuan sarana/prasarana budidaya ikan dan benih ikan	bantuan sarpras	Kali	v	v	v			Tidak terkait	DKP	DKP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana aksi	Output		Target Triwulan					Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	satuan	I	II	III	IV	Total			
				Pelatihan Teknis Budidaya ikan	Bimtek budidaya ikan	Kali	v	v	v			Terkait	DKP	DKP
Capaian produksi tanaman pangan belum maksimal	Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	2,12%	Pelaksanaan inseminasi buatan ternak kambing/domba	jumlah kelahiran kambing/domba hasil inseminasi	ekor	v	v	v	v		Terkait	DKPP	DKPP
				pelaksanaan inseminasi buatan ternak sapi	jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi	ekor	v	v	v	v		Terkait	DKPP	DKPP
				penyelenggaraan pelatihan budidaya ayam joper	Pelatihan yang diselenggarakan	kali	v	v	v	v		Terkait	DKPP	DKPP
				Gerakan pengendalian Organisme pengganggu tanaman (OPT)	Luas lahan tertangani	Ha	V	V	V	V		Terkait	DKPP	DKPP
				Pelatihan budidaya tanaman pangan	Bimtek budidaya tanaman pangan	kali	V	V	V	V		Terkait	DKPP	DKPP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH